

PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL

Relevansi dan Kontribusinya dalam Pembangunan Sosial

Suradi

Abstract. The social problems these days are so complex that it is impossible to solve it only by one dimensional approach since this approach is actually not for used on solving the problems. To solve then social problems, we need to develop multi dimensional approach. Social workers provide that approach. In general, social workers provide social intervansion which is focused on problem solving which implement various approaches comprehensively (from various perspectives). In this generalist model, social intervansion is supported by social workers basic system which work sinergically

Key Words : social work and social welfare, social problem, social development.

I. PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang terjadi di era modern dewasa ini memerlukan respon dari semua pihak, terutama dari kalangan akademisi, birokrasi maupun praktisi bidang pembangunan sosial. Respon dimaksud tentunya berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan sosial secara tepat guna dan berhasil guna. Sehubungan dengan itu, maka friksi-friksi di dalam ilmu-ilmu sosial dewasa ini sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Prof. Takashi sebagaimana dikutip oleh Robert M.Z Lawang (2005) mengatakan bahwa :”pendekatan disipliner seperti sosiologi, politik, psikologi, ekonomi, antropologi atau apapun lainnya, sudah tidak relevan lagi untuk digunakan saat ini. Sebaliknya, pendekatan yang berbasis masalah lebih banyak digunakan”. Artinya, kalau dalam kehidupan riil ada masalah, maka konsentrasi kita harus tertuju pada usaha menggunakan ilmu apa saja.

Kemudian dia tambahkan lagi mengenai kekecewaannya tentang ilmu di Asia (terutama ilmu sosial), yang lebih banyak dimengerti dengan menggunakan konsep dari luar, daripada konsep-konsep yang seharusnya dikonstruksikan dari dalam masyarakat Asia itu sendiri”.

Kalau saja yang merasa terusik dalam menata jalan pikirannya tidak hanya seorang sosiolog, tetapi juga antropolog, psikolog, ekonom, ahli politik dan ahli-ahli lainnya, dan semuanya sepakat bahwa ilmu dan keahliannya berorientasi pada pemecahan masalah, maka ilmu-ilmu yang dikuasainya itu akan lebih memberikan sumbangan nyata dan bermakna dalam pemecahan masalah. Tidak ada lagi batas hitam putih antara disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain. Sebaliknya yang terjadi bahwa antar disiplin ilmu saling bersinggungan dan berinteraksi secara sinergis, sehingga menghilangkan garis batas yang ekstrem antar disiplin ilmu-ilmu tersebut.

Ilmu pekerjaan sosial tetap sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu pada *art* atau *skill*. Namun demikian pada prakteknya, tidak dapat dipungkiri ilmu pekerjaan sosial masih “meminjam” ilmu-ilmu sosial lain, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik dalam melakukan analisis secara obyektif dan mendalam tentang hakikat masalah sosial. Sebagai contoh, pekerja sosial yang akan memberikan intervensi sosial kepada wanita tuna sosial, dimulai dengan melakukan asesmen. Pada kegiatan asesmen ini akan dilakukan pengkajian dan pemahaman masalah wanita tuna susila tersebut dari berbagai perspektif. Sosiologi digunakan untuk memahami bagaimana interaksi sosial didalam keluarga dan lingkungan sosialnya; antropologi digunakan untuk memahami pola kebudayaan pada masyarakat dimana wanita tuna sosial tinggal; ekonomi digunakan untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga dan aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi; psikologi digunakan untuk memahami bagaimana kondisi psikologis dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tekanan pada aspek psikologis; serta politik digunakan untuk memahami aspirasi politik dan tekanan politik si wanita tuna susila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, diingatkan oleh Shulman (Tangdilintin, 1998), bahwa meminjam atau mengaplikasikan ilmu lain banyak menolong, tetapi semakin lama semakin terasa, bahwa pada tingkat aplikasi tertentu “meminjam” dapat menimbulkan kesulitan, dan juga kadang-kadang teori atau konsep yang dipinjam itu tidak sesuai dengan masalah yang menjadi prioritas.

Oleh karena ilmu pekerjaan sosial berorientasi pada pemecahan masalah, maka ilmu pekerjaan sosial menjadi disiplin ilmu utama pada lembaga yang menyelenggarakan pelayanan sosial. Sementara itu, ilmu-ilmu sosial lainnya mendukung ilmu pekerjaan sosial tersebut, terutama didalam melakukan assessment terhadap klien (individu, kelompok, masyarakat) dan aspek-aspek yang mempengaruhi peran sosial klien. Apa yang dimaksud oleh seorang Profesor Takahashi dari Jepang sudah terjawab, bahwa ilmu pekerjaan sosial merupakan ilmu yang relevan dengan situasi saat ini, karena ilmu pekerjaan sosial berorientasi pada upaya pemecahan masalah.

II. PERDEBATAN TENTANG PEKERJAAN SOSIAL

Perdebatan tentang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial sebagai ilmu atau bukan ilmu masih terjadi di Indonesia. Perdebatan ini terjadi, karena adanya mispersepsi tentang kesejahteraan sosial di kalangan akademisi maupun praktisi. Adanya mispersepsi ini berakibat stigma bagi “*moral career*”, yaitu timbulnya kecenderungan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan pandangan yang menyimpang tentang kesejahteraan sosial. Gejala misinterpretasi ini dapat menjadi sumber distorsi bagi ilmu kesejahteraan sosial (Tangdilintin, 1998).

Di negara-negara maju, pekerjaan sosial sudah tidak menjadi perdebatan. Apakah pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial itu dikategorikan ke dalam “disiplin ilmu tersendiri” atau “keterampilan kerja sosial”. Maka dari itu, di negara-negara maju, pekerjaan sosial telah mewarnai semua kebijakan pembangunan yang diselenggarakan oleh negara dalam

berbagai sektor. Sebagian negara-negara maju bahkan menganut *welfare state*, yaitu suatu negara yang mengembangkan kebijakan bahwa kesejahteraan sosial rakyat merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Menurut pendekatan kebijakan intervensionis negara-negara sedang berkembang dan miskin menganut paham sosialisme dimana kepentingan umum harus diutamakan. Negara mengatur banyak hal dan tidak mengenal prinsip kebebasan individu seperti diadopsi dalam sistem pasar bebas. Tetapi negara juga tidak mengadopsi *welfare state* karena tidak cukup uang. Sementara itu, Indonesia menganut model *participatory welfare state* atau *welfare pluralism*, bahwa negara tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial, meskipun dalam operasinya melibatkan masyarakat (Suharto, 2005)

Di kawasan Asia Tenggara kecuali Indonesia, pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu telah berkembang dengan baik yang ditandai dengan dibukanya program studi setingkat magister dan doktoral jurusan pekerjaan sosial. Tidak sedikit warga negara Indonesia dari kalangan akademisi maupun birokrasi menempuh program studi tersebut setingkat magister maupun doktoral. Hal ini menunjukkan, bahwa di Indonesia pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial sudah semakin diterima sebagai ilmu (terutama di kalangan akademisi), walaupun disiplin pekerjaan sosial pada jenjang magister dan doktor tersebut diperoleh di luar negeri. Isbandi dalam bukunya "*Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*" (2005), berusaha memberikan pencerahan bagi akademisi maupun praktisi bahwa kesejahteraan sosial memenuhi kaidah-kaidah ilmiah sebagai

suatu ilmu. Usaha ini patut dihargai dan diharapkan menjadi gerakan diterimanya kesejahteraan sosial sebagai ilmu di Indonesia.

Kembali pada uraian yang dikutip oleh Robert M.Z Lawang (2005) di atas, tanpa ada apriori terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya, bahwa ilmu-ilmu sosial yang ada (sebagai ilmu murni) sudah tidak relevan untuk digunakan secara mandiri pada saat ini. Sebaliknya, pendekatan yang berbasis masalah mestinya akan lebih banyak digunakan. Ilmu pekerjaan sosial adalah jawabannya, karena disiplin ilmu ini menawarkan pendekatan yang berbasis masalah dengan dukungan ilmu-ilmu sosial lainnya. Karena itu di kalangan akademisi, ilmu pekerjaan sosial dikenal dengan disiplin ilmu terapan. Ilmu pekerjaan sosial ada untuk kepentingan pemecahan masalah sosial pada saat ini, dan mengantisipasi terjadinya atau kecenderungan terjadinya masalah sosial di masa depan.

Apabila pemikiran Profesor Takahashi dari Jepang tersebut dapat diterima di kalangan administrator dan penyelenggara program pembangunan sosial, maka setiap program sosial tentu akan mempraktekkan pendekatan pekerjaan sosial. Implikasinya adalah diperolehnya informasi yang obyektif, tepat dan lengkap dalam memahami akar masalah sosial dan kebutuhan riil masyarakat. Selanjutnya dapat dirancangembangkan program-program sosial yang tepat dan berpihak pada hak-hak dasar dan kebutuhan nyata masyarakat.

III. PEKERJAAN SOSIAL DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN SOSIAL

Pembahasan tentang isu-isu dan masalah sosial di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dengan kondisi kehidupan

masyarakatnya. Bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya atau dikenal dengan masyarakat majemuk atau *multikultur*. Kondisi ini di satu sisi merupakan potensi dan sumber daya serta kekayaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga merupakan faktor yang dapat memicu dan memacu terganggunya ketahanan sosial masyarakat karena rawan terjadi konflik sosial horizontal maupun vertikal. Terjadinya konflik sosial di beberapa wilayah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, seperti yang dikenal dengan kasus Sambas, Sampit, Poso, Ambon dan Papua, merupakan bukti dari sisi negatif kesukubangsaan Indonesia yang bercorak *multikultur*. Hal ini terjadi disebabkan oleh belum dihayatinya kehidupan multikultur ini oleh segenap elemen masyarakat.

Kondisi *multikultur* yang masih menimbulkan rawan konflik sosial ini, kemudian ditambah dengan terjadinya transformasi sosial budaya yang berlangsung sangat cepat dewasa ini. Disadari ataupun tidak, transformasi sosial budaya ini membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi sebagian kehidupan individu, keluarga maupun masyarakat Indonesia. Konsumerisme, hedonisme, individualisme dan materialisme sebagai ekses globalisasi, kini mulai dirasakan memasuki berbagai aspek kehidupan individu, keluarga maupun masyarakat. Ekses lainnya yaitu terjadinya pergeseran cara pandang masyarakat tentang keluarga, rumah tangga dan pola interaksi sosial, baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis (Hawari, 1995). Fenomena sosial ini, kini sudah terjadi secara luas pada semua lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Selain menjadi masalah nasional, berbagai masalah sosial di tanah air juga

menjadi isu global, dan menjadi perhatian penting pada agenda pembangunan millenium III, dikaitkan dengan hak asasi manusia, hak anak, hak asasi komunitas adat dan hak perempuan. Berbagai masalah sosial tersebut telah direspon cukup baik oleh berbagai lembaga multilateral melalui program dan proyek-proyek kesejahteraan sosial. Program dan proyek-proyek tersebut langsung diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat diberbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain lembaga-lembaga tersebut, *World Bank*, *International Moneter Fund* (IMF) dan *Asian Development Bank* adalah lembaga donor yang juga menaruh perhatian besar terhadap permasalahan pembangunan manusia, khususnya sektor kesejahteraan sosial.

Peran aktif lembaga multilateral tersebut didasarkan pada kondisi obyektif yang terjadi di Indonesia dewasa ini, dimana di satu sisi menghadapi skala masalah sosial yang cukup besar, dan di sisi lain kurangnya kemampuan dan sumber daya untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Namun demikian, peran aktif lembaga multilateral tersebut bukan bersifat permanen, atau lebih bersifat penguatan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia sendiri. Maka dari itu, peran aktif lembaga multilateral di Indonesia tersebut diharapkan tidak terlalu jauh, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia menjadi sangat bergantung untuk jangka panjang (Robert Boyer, 2006).

Peran aktif lembaga-lembaga internasional dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, menunjukkan bahwa program pembangunan kesejahteraan sosial tersebut sudah menjadi isu global. Permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh Indonesia ikut dirasakan oleh masyarakat

dunia, dan mendorong mereka untuk melakukan berbagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Implikasinya bahwa sektor kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan sosial akan sangat terkait dengan dimensi ekonomi maupun politik dalam agenda pembangunan global. Tidak menutup kemungkinan, komitmen suatu negara dalam pembangunan sosial akan menjadi pertimbangan bagi lembaga multilateral, lembaga donor maupun negara maju untuk membangun jaringan kerja secara permanen di bidang ekonomi maupun politik.

Isu global masalah sosial tersebut di atas merupakan landasan utama dalam membangun kerangka kebijakan dan program pembangunan sosial di Indonesia. Masalah sosial yang semakin kompleks, kini perlu didekati dengan berbagai disiplin, dan disiplin ilmu yang utama adalah ilmu pekerjaan sosial. Pendekatan disiplin dalam memahami masalah sosial sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dewasa ini. Hal ini didasarkan pada kondisi obyektif, bahwa masalah sosial bersifat kompleks atau multi dimensional (*multiple face of social problems*). Satu masalah sosial tertentu memiliki dimensi sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi dan politik. Bahkan kompleksitas masalah sosial terjadi disebabkan adanya interaksi yang kuat antar masalah sosial itu sendiri. Dalam kehidupan nyata tidak sedikit masalah sosial disebabkan oleh masalah sosial yang lain, atau mengakibatkan terjadinya masalah sosial yang lain. Oleh sebab itu, seringkali ditemukan pola jejaring masalah sosial yang sangat rumit dan tidak mudah menemukan dari mana dimulai pemecahannya.

Pemahaman terhadap dimensi-dimensi masalah sosial ini sangat penting dalam upaya menemukan akar masalah dan

model-model intervensi sosial yang tepat. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Takahashi dari Jepang pada uraian sebelumnya, kalau dalam kehidupan riil ada masalah, maka konsentrasi kita harus tertuju pada usaha menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Dalam pemecahan masalah sosial, pekerjaan sosial merupakan disiplin ilmu utama yang dikonstruksikan dari kehidupan nyata masyarakat. Oleh karena itu, dewasa ini sudah tidak relevan lagi mempermasalahkan peranan ilmu pekerjaan sosial dalam pembangunan sosial. Sebaliknya, keberadaan ilmu pekerjaan sosial justru sangat diperlukan karena memiliki relevansi dengan kondisi obyektif dinamika masyarakat dengan segala akibatnya. Lebih lanjut ilmu pekerjaan sosial akan memberikan kontribusi yang sangat nyata mulai dari analisis masalah sampai pada menemukan kebutuhan strategis yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengatasi masalahnya.

Berbeda dengan ilmu sosial lainnya, ilmu pekerjaan sosial mengajarkan bagaimana mengembangkan *art* atau *skill* dalam membangun relasi sosial dengan penyandang masalah maupun dengan pemilik sumber daya sosial. Hal ini tentu tidak ditemukan oleh ilmu sosial lain, karena mereka tidak berorientasi pada pemecahan masalah. Adanya *art* atau *skill* ini menjadikan ilmu pekerjaan sosial sangat dinamis dalam mengikuti perkembangan pemikiran-pemikiran, perubahan sosial, dan dinamika masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global.

IV. TANTANGAN ILMU PEKERJAAN SOSIAL DEWASA INI

Meskipun secara teoritik ilmu pekerjaan sosial merupakan disiplin utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, namun sampai saat ini masih

menghadapi banyak tantangan yang berasal dari masyarakat maupun dari lingkungan birokrasi, antara lain :

1. Masih berkembangnya anggapan bahwa masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani oleh siapapun, tanpa memerlukan kompetensi. Hal ini tercermin dari rekrutmen tenaga yang kurang mempertimbangkan kompetensi, dan sebaliknya lebih mempertimbangkan kualifikasi. Pandangan ini juga pernah menimbulkan dampak buruk dan tercatat dalam sejarah tersendiri bagi Departemen Sosial yang dihapuskan dari susunan kabinet pada tahun 2000.
2. Pengisian formasi tenaga di lingkungan birokrasi, terutama untuk bidang teknis pelayanan sosial belum sepenuhnya mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang pekerjaan sosial.
3. Masih berkembangnya pemikiran, bahwa pelayanan sosial tidak memerlukan landasan teoritis. Hal ini dapat dicermati dari produk-produk kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berupa pedoman umum, pedoman operasional dan standardisasi yang masih belum sepenuhnya disusun berdasarkan perspektif pekerjaan sosial.
4. Lemahnya penyajian data permasalahan sosial dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial yang terjamin validitasnya. Hal ini dapat dicermati dari ditemukannya data yang berbeda untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tertentu pada instansi sosial. Kelemahan data ini juga disebabkan oleh kurang jelasnya kriteria dan indikator yang digunakan dalam menghimpun data

penyandang masalah kesejah-teraaan sosial, maupun kriteria dan indikator potensi dan sumber kesejah-teraaan sosial (PSKS).

5. Ahli-ahli pekerjaan sosial yang memiliki latar belakang pendidikan formal pekerjaan sosial, belum mampu membangun kekuatan melalui sebuah organisasi profesi pekerjaan sosial. Walaupun di Indonesia pernah ada Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), namun kiprah organisasi ini dapat dikatakan belum nyata. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi upaya pengembangan ilmu pekerjaan sosial.

Berbagai tantangan tersebut bukan sesuatu yang mudah dipecahkan. Diperlukan waktu untuk mengatasi tantangan ini dikarenakan banyaknya faktor yang saling berkait. Hal ini antara lain disebabkan oleh persebaran sarjana pekerjaan sosial yang sebagian besar bekerja pada birokrasi pemerintah. Disadari ataupun tidak, sarjana pekerjaan sosial tersebut telah terkooptasi dengan sistem yang berlaku di lingkungan birokrasi pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada eksistensi mereka. Anehnya, para sarjana pekerjaan sosial menikmati posisi pada jabatan struktural dengan berbagai fasilitas yang diperolehnya pada lingkungan birokrasi pemerintah tersebut.

Dibalik berbagai tantangan perkembangan ilmu pekerjaan sosial di kalangan birokrasi pemerintah tersebut, ada gelagat perkembangan ilmu pekerjaan sosial di kalangan Organisasi Non Pemerintah (NGO's). Meskipun secara eksplisit mereka kurang menggunakan *teks book* pekerjaan sosial, namun psinisp-prinsip dan metode yang dikembangkannya adalah prinsip-prinsip dan metode yang berakar pada ilmu

pekerjaan sosial. Mereka secara aktif dan intensif melakukan kajian-kajian kesejahteraan sosial, penelitian aksi partisipatif, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya sosial lokal. Kiprah berbagai NGO's sangat nyata dalam pembangunan sosial (Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, 2003).

Oleh karena itu, birokrasi pemerintah perlu melakukan reorientasi dalam pengembangan jaringan kerja dengan NGO's tersebut. Pola interaksi yang selama ini terkesan *vis-à-vis* perlu diubah menjadi pola interaksi yang kolaboratif. Bagaimanapun perlu diakui, bahwa NGO's memiliki keunggulan dalam praktik pemberdayaan masyarakat karena pada umumnya aksi mereka didasarkan pada komitmen kemanusiaan yang sangat kuat. Komitmen NGO's ini tentu berbeda dengan komitmen yang ada pada birokrasi pemerintah, yang lebih pada menggugurkan kewajiban negara terhadap rakyatnya.

V. KESIMPULAN

Sebagai ilmu terapan, ilmu pekerjaan sosial memberikan jalan keluar yang realistik dalam pemecahan masalah sosial. Bersama-sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, ilmu pekerjaan sosial dapat menemukan masalah, kebutuhan dan potensi kesejahteraan sosial secara tepat sebagai dasar dalam pemecahan masalah. Meskipun peran dan kontribusinya cukup nyata, namun ilmu pekerjaan sosial masih belum sepenuhnya menjadi referensi dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Hal ini akan menjadi persoalan jangka panjang, karena apabila hal ini terus berlanjut maka pada saatnya nanti program kesejahteraan sosial akan kehilangan jati diri dan fokus sasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2005, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial; Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, Jakarta: UI-Press.
- Boyer, Robert, "Menanam Kembali Ekonomi ke Dalam Proses Sosial", Jakarta : KOMPAS, Jumat, 14 Juli 2006.
- C. Korten, David, 1982, *Pembangunan Berpusat pada Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Sosial, 2005, "Data Penyanggah Masalah, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial", Jakarta : Pusdatin - Departemen Sosial RI.
- Kirdt - Ashman, Karen K dan Grafton H. Hull, Jr, 1993, *Understanding generalist Practice*, Nelson-Hall Publishers : Chicago, USA.
- Lawang, R.M.Z, 2005, *Kapital Sosial : dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nuryana, Mu'man, 2003, *Pola Rekonsiliasi Masyarakat Antar Etnis di Daerah Konflik di Indonesia* (Seri Penelitian), Jakarta : Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Pincus, Allan dan Anne Minahan, 1973, *Social Work Praticice : Model and Methode*, Illinois - USA : FE Peacock Phubliser Inc.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : Rafika Aditama.
- Suradi, 2001, "Model Generalis dalam Praktek Pekerjaan Sosial : Intervensi Sosial Berpusat pada Masalah", Informasi Kajian Permasalahan dan Usaha Kesejah-

teraan Keluarga, Vol 6 Nomor 2,
Puslitbang Kesejahteraan Keluarga,
Jakarta.

Tan, Jo Hann dan Roem Topatimasang,
2003, *Pengorganisasian Rakyat : Refleksi
Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di
Asia Tenggara*, Kualalumpur - Malaysia
: *South East Asia Populer Communication
Programmes (SEAPCP) dan Research, Edu-
cation and Dialogue (REaD)*.

Tangdilintin, Paulus, 1998, "Kesejahteraan
Sosial : Ilmu yang Terdistorsi",
Makalah disampaikan pada Kuliah
Perdana Program Pasca Sarjana Ilmu
Kesejahteraan Sosial di Universitas In-
donesia, Depok.

Kirdt - Ashman, Karen K dan Grafton H.
Hull, Jr, 1993, *Understanding generalist
Practice*, Nelson-Hall Publishers : Chi-
cago, USA.

Drs. Suradi, M.Si. Sarjana Pekerjaan Sosial
dari STKS Bandung dan Magister Sain
Prorgam Studi Sosiologi Kekhususan
Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Univer-
sitas Indonesia. Peneliti Madya bidang
Kebijakan Sosial. Aktif mengikuti dan
menjadi pembicara dalam seminar dan
diskusi ilmiah tentang pembangunan
kesejahteraan sosial. Tulisannya sering
dimuat pada Jurnal dan majalah ilmiah
lain di lingkungan Departemen Sosial.
Saat ini menjabat Ketua Dewan
Editor INFORMASI, anggota Panitia
Penilai Jabatan Peneliti (P2JP)
Departemen Sosial dan anggota tim
teknis pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil.